

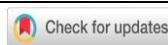


STRUKTURASI PENDIDIKAN INKLUSI PADA LINGKUNGAN HETEROGEN

Lussy Yuris Frasticha¹

¹ Universitas Airlangga, Indonesia

Email: lyurisfrasticha@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i1.1564>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 January 2026

Final Revised: 24 January 2026

Accepted: 10 February 2026

Published: 17 February 2026

Keywords:

Pendidikan Inklusi

Teori Struktural

Lingkungan Heterogen

Kesadaran

Siswa Difabel



ABSTRACT

This study aims to analyze the structuration of inclusive education implementation within a heterogeneous environment and to understand the awareness of students with different abilities (difabel) following the receipt of inclusive education at SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews using semi-structured guides and documentation from various secondary sources. The results indicate that the implementation of inclusive education at SMA Negeri 1 Gedangan has been optimized through several initiatives, including the adjustment of the regular curriculum by lowering the Minimum Completeness Criteria (KKM) for students with disabilities, the provision of Special Assistant Teachers (GPK), and the establishment of resource rooms. This practice forms an "inclusive culture," which is the outcome of the duality between agents (school, teachers, students) and structure (government policies and school regulations). From the perspective of Anthony Giddens' Structuration Theory, these social practices are influenced by the structural dimensions of significance, domination, and legitimization. Furthermore, the study finds that the educational process fosters "practical consciousness" in students with disabilities who can perform routine activities according to their abilities, while others exhibit "discursive consciousness" due to inconsistencies between their routines and their specific capabilities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strukturasi implementasi pendidikan inklusi pada lingkungan heterogen serta mengetahui kesadaran siswa difabel (different ability) pasca penerimaan pendidikan inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi dokumentasi dari berbagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan telah berjalan maksimal melalui berbagai upaya, seperti penyesuaian kurikulum reguler dengan penurunan standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) khusus, penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK), dan pengadaan ruang sumber. Praktik ini membentuk sebuah budaya inklusi (*inclusive culture*) yang merupakan hasil dari dualitas hubungan antara agen (sekolah, guru, siswa) dan struktur (kebijakan pemerintah dan aturan sekolah). Berdasarkan perspektif teori struktural Anthony Giddens, praktik sosial ini dipengaruhi oleh dimensi struktural signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Selain itu, ditemukan bahwa proses pendidikan tersebut membentuk respon berupa kesadaran praktis bagi siswa difabel yang mampu menjalankan kegiatan rutin sesuai kemampuan mereka, sementara siswa lainnya menunjukkan kesadaran diskursif karena adanya ketidaksesuaian rutinitas dengan kemampuan khusus yang dimiliki.

Kata kunci: Pendidikan Inklusi, Teori Struktural, Lingkungan Heterogen, Kesadaran, Siswa Difabel.

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 menyebutkan, "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". menunjukkan bahwa isi dari alinea tersebut merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk terus maju dalam segala aspek kehidupan. 'Mencerdaskan Kehidupan Bangsa' erat kaitannya dengan Pendidikan yang sedang berjalan di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan memiliki arti suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, dan perbuatan mendidik. Dalam pandangan Aristoteles, Pendidikan sebagai bentuk persiapan atau bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak, serta dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai (koresponden) dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti perkembangan secara bertahap, baik secara fisik (lahiriah) maupun mental(batiniah/jiwa).¹

Pendidikan adalah sebuah usaha vital yang akan menentukan arah kemajuan suatu bangsa, dan pendidikan bukan hanya usaha untuk mencerdaskan anak bangsa di bidang akademik, melainkan harus dapat membentuk kepribadian peserta didik sehingga menjadi generasi yang cerdas dan berakhhlak mulia. Oleh karena itu diperlukan berbagai usaha dan penerapan sistem yang cermat agar menampakkan hasil yang memuaskan. Pendidikan memang perlu diprioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat, dan terikat erat dengan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Menurut Peraturan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya pada undang-undang ini pasal 5 ayat (2) *Warga negara yang mempunyai Kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus*, dan pada ayat (4) *Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus*. Dengan dasar kebijakan tersebut akses pendidikan berhak didapatkan oleh seluruh warga negara tanpa kecuali. Sebagaimana disebutkan pula dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengenai masalah dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan inklusi yang seharusnya memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus agar peserta didik tersebut secara aktif mengembangkan potensi diri dan tak luput dari perhatian pemerintah. Namun terasa masih belum terpenuhi secara optimal. Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, diantaranya Sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat bagi anak difabel dengan kondisi kecerdasan dibawah rata-rata (tunagrahita), Kesulitan menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler dengan variasi kebutuhan belajar anak difabel, dan Belum semua guru reguler memiliki kompetensi memberikan layanan anak difabel dan masih minimnya guru pembimbing khusus (GPK). Permasalahan – permasalahan tersebut menjadi perhatian khusus apabila masih minim

partisipasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yakni sekolah guna mewujudkan suatu pemerataan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pada undang-undang.

Pendidikan inklusi termasuk program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa adanya diskriminasi terhadap berbagai lapisan masyarakat dengan perbedaan yang ada didalamnya. Selaras dengan hal tersebut pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo mendeklarasikan diri sebagai kabupaten pendidikan inklusif dan bahkan mendapat kepercayaan sebagai pelopor pembudaya pendidikan inklusi di Indonesia. Saat ini kabupaten Sidoarjo telah dipercaya sebagai salah satu pionir penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah menunjuk beberapa sekolah regular penyelenggara pendidikan inklusi di Sidoarjo seperti SMK Negeri 1 Sidoarjo, SMK Negeri 3 Sidoarjo, SMA Negeri 4 Sidoarjo, dan SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. Sekolah – sekolah inilah yang menjadi menunjukkan bahwa lingkungan heterogen terbangun, sekolah regular sebagai penyelenggara pendidikan inklusi akan terdapat banyak kelompok-kelompok yang ikut andil dalam penyelenggarannya. Dari hal inilah peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan strukturasi pendidikan inklusi pada lingkungan heterogen dengan studi kasus yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, seperti yang diungkapkan oleh Antony Giddens mengenai konsep Strukturasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian kali ini tentang "Strukturasi Pendidikan Inklusi Pada Lingkungan Heterogen (Studi Kasus Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Di SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo)" menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Metode studi kasus dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian berlokasi di Kabupaten Sidoarjo yakni SMA Negeri 1 Gedangan karena merupakan sekolah pioneer penyelenggara pendidikan inklusi. SMA Negeri 1 Gedangan terletak di Jl. Raya Sedati Km 2. Gedangan – Sidoarjo. Alasan peneliti memilih lokasi ini ialah terkait dengan kondisi khusus. Yakni, beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi seperti SMK Negeri 1 Sidoarjo, SMK Negeri 3 Sidoarjo dan SMA Negeri 4 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Gedangan adalah pioneer dalam penyelenggara pelayanan pendidikan inklusi di Jawa Timur.

Pada penelitian ini subjek yang menjadi sotongan yakni implementasi pendidikan inklusi pada lingkungan heterogen, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, siswa difabel serta siswa regular yang ada dalam satu struktur tersebut. Penelitian kualitatif memiliki teknik yang berbeda dari pendekatan kuantitatif dalam hal pemilihan subjek. Subjek penelitian kualitatif dipilih dengan teknik non-probabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subjektif peneliti yang didasarkan pada jangkauan dan kedalaman masalah yang diteliti (Sarwono, 2006: 205). Teknik analisis data adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni: 1) mengorganisasi data, 2) membuat kategori, menentukan tema dan pola, 3) menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada, 4) dengan menjabarkan secara dekriptif data-data dan hasil temuan di lapangan (hasil tersebut akan dikupas dalam pembahasan dengan perspektif teori ekofeminisme milik Shiva), 5) menulis laporan (Sarwono, 2006: 239-240). Teknik keabsahan data yang dipakai adalah teknik triangulasi, yakni menguji keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara dari beberapa subjek yang berbeda. Selain itu, triangulasi juga dilakukan terhadap sumber data. Yakni, membandingkan hasil data dari observasi, data hasil

wawancara terhadap subjek, dan data sekunder yang didapat dari jurnal penelitian terdahulu yang dipakai sebagai referensi membangun asumsi awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan

Adapun beragam pengertian dari pendidikan inklusi salah satunya seperti yang dikutip oleh (Salamanca,1994). "Pendidikan inklusif merupakan perkembangan pelayanan pendidikan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dimana prinsip mendasar dari pendidikan inklusif, selama memungkinkan, semua anak atau peserta didik seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.". Dan dari pernyataan-pernyataan diatas menandakan bahwa sekolah regular yang berorientasi menjadi sekolah inklusi, merupakan alat untuk mendidik semua anak dengan tidak membedakan anak normal dan/atau anak difabel, sehingga dapat memerangi sikap diskriminasi dan menciptakan masyarakat yang inklusif (*inclusive society*) dimana kondisi kehidupan masyarakat yang saling terbuka, saling menerima, dan saling menghargai dalam keberagaman serta perlakuan yang adil kepada setiap orang.

Saat ini kabupaten Sidoarjo telah dipercaya sebagai salah satu pionir penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah menunjuk beberapa sekolah regular penyelenggara pendidikan inklusi di Sidoarjo seperti SMK Negeri 1 Sidoarjo, SMK Negeri 3 Sidoarjo, SMA Negeri 4 Sidoarjo, dan SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Muchammad Ilyas, S.Pd., M.Pd. selaku koordinator pendidikan inklusif SMA Negeri 1 Gedangan pada salah satu majalah siswa SMA Negeri 1 Gedangan INCREABLE bahwa strategi pembudayaan pendidikan inklusif dimaknai sebagai cara atau kegiatan yang dilakukan agar ide atau konsep pendidikan inklusif benar-benar membudaya dalam praktik pendidikan dan kehidupan masyarakat secara luas. Hal itu dibuktikan dengan keinginan terwujudnya masyarakat inklusif yang secara umum memiliki tiga tahapan yaitu:

- a. Tahap pengenalan adalah suatu tahap atau kondisi yang masyarakat baru memulai mengenal atau memahami konsep dan filosofi pendidikan inklusif. Berbagai *stakeholders* atau elemen yang ada di masyarakat sudah memperoleh informasi tentang konsep pendidikan inklusif melalui berbagai cara dan media.
- b. Tahap pengembangan adalah tahap atau kondisi yang lebih maju daripada tahap pengenalan dimana masyarakat dan berbagai *stakeholders* sudah mulai melakukan aktivitas konkret untuk melaksanakan pendidikan inklusif.
- c. Tahap pembudayaan adalah suatu tahap yang mapan. Dalam tahap ini ide, ciri atau karakteristik pendidikan inklusif sudah dijalankan secara sistemik, konsisten, melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahap ini, semua *stakeholders* dan elemen masyarakat memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku, yang inklusif. Semua warga negara dalam berbagai kondisi, termasuk anak difabel memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan kehidupan lainnya, serta memperoleh pengakuan dan penghargaan yang sama. Ketika kondisi ini sudah tercapai, pada saat yang bersamaan sudah terbangun kehidupan masyarakat yang inklusif (*inclusive society*).

Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan inklusif masih saja menemui banyak kendala. SMA Negeri 1 Gedangan yang merupakan salah satu sektor yang dipercaya menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan berbagai indikator kebijakan dinilai sudah baik, salah satunya adalah *Inclusive Culture* (Budaya Inklusi). *Inclusive Culture* adalah budaya yang melibatkan seluruh civitas akademika SMAN 1 Gedangan yang saling menghormati,

menghargai, memperlakukan siswa difabel dengan baik dan tidak membeda-bedakan keberadaan mereka. Siswa tidak pilih-pilih dalam berteman. Strategi pembudayaan pendidikan inklusif dimaknai sebagai cara atau kegiatan yang dilakukan agar ide atau konsep pendidikan inklusif benar-benar membudaya dalam praktik pendidikan dan kehidupan masyarakat secara luas. Tanpa terasa SMA Negeri 1 Gedangan telah memasuki tahun ke-8 sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Sidoarjo. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan-kebijakan tersebut yakni:

1. Peserta didik anak difabel melakukan pembelajaran dikelas reguler dan membaur dengan anak-anak reguler.
2. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler. Sekolah menurunkan aspek pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) khusus anak difabel seusai dengan kebutuhannya.
3. Penyediaan ruang sumber sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak difabel di SMA Negeri 1 Gedangan.
4. Penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk mendampingi peserta didik inklusi dalam pembelajaran dikelas reguler.

Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Lingkungan Heterogen Dalam Prespektif Antony Giddens

Menurut teori strukturasi, pemerintah dalam hal ini memiliki dominasi atas terselenggaranya pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah regular tersebut. Struktur dominasi merupakan satu dari tiga gugus struktur kehidupan sosial yang dijelaskan Giddens, yang identik dengan penguasaan yang melingkupi skemata penguasaan atas orang (politik) ataupun barang/hal (ekonomi) (Priyono, 2002, hlm. 24). Pada penelitian ini, pemerintah dianggap memiliki peran yang dominan di antara agen lainnya karena tanpa persetujuan pemerintah, penyelenggaraan pendidikan inklusi pad seluruh sekolah yang ditunjuk sebagai pioneer tidak dapat berlangsung. Seperti yang diketahui, pemerintah memiliki dominasi atas berbagai sektor. Dengan dominasinya, pemerintah berhak menentukan kebijakan pendidikan yang seperti apa yang akan diberikan bagi siswa difabel (*Different Ability*). SMA Negeri 1 Gedangan sebagai sekolah percontohan telah menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan sebagai penunjang iterapkannya pendidikan di sekolah tersebut. mengingat bahwa mayoritas civitas akademika yang ada di SMANegeri 1 Gedangann adalah siswa regular dan siswa difabel sebagai kelompok minoritas.

Diberlakukannya Inclusive Culture (Budaya Inklusi) yang didalamnya terdapat berbagai kebijakan, membudayakan belajar dalam satu kelas bersama siswa regular, serta kegiatan-kegiatan penunjang yang mendorong keterampilan bagi siswa ini juga berkaitan dengan rasionalitas tindakan agen-agen yang terlibat di dalamnya, seperti Sekolah, Guru, Siswa Reguler dan Siswa Difabel itu sendiri. Menurut Giddens, rasionalisasi tindakan ini merujuk pada kesengajaan (*intentionality*) sebagai proses merupakan suatu karakteristik rutin perilaku manusia yang dilakukan dalam cara-cara yang biasa (Giddens, 2010, hlm. 5). Budaya inklusi pada SMA Negeri 1 Geangan sengaja dilakukan dengan jenis-jenis kegiatan maupun keterampilan yang dianggap wajar dan sesuai bagi penyandang disabilitas dilakukan secara rutin dan kebanyakan tanpa perdebatan sehingga hal tersebut yang dimaksudkan Giddens sebagai rasionalisasi tindakan. Giddens menjelaskan bahwa rasionalisasi tindakan yang dimiliki oleh agen adalah ketika agen mempertahankan suatu ‘pemahaman teoritis’ secara terusmenerus tentang landasan aktivitasnya (Giddens, 2010, hlm. 8).

Kesadaran Siswa Difabel Pasca Penerimaan Pendidikan Inklusi Pada Lingkungan Heterogen

Siswa Difabel (*Different Ability*) seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan siswa lainnya dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak. Jika dilihat lebih dalam siswa difabel juga memiliki kemampuan istimewa yang mana dapat lebih dikembangkan dan didorong untuk terus maju. Siswa Difabel memiliki keistimewaan tersendiri, keistimewaan tersebut bukan berarti dalam sebuah kekurangan melainkan perbedaan kemampuan dari siswa lainnya. Namun perbedaan itu bukan berarti menimbulkan suatu tindakan diskriminasi. Melalui akses untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa dibedakan dari segi sekolah, maka akan dapat memunculkan tingkat kesetaraan yang adil.

Dalam paparan Giddens, keinginan para siswa difabel untuk mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan ada kaitannya dengan motif untuk mengembangkan kemampuan. Salah satu hal yang berkaitan dengan motif ini dalam strukturasi Giddens adalah tentang kesadaran. Giddens menggagas tentang kesadaran praktis bersama dengan motivasi tidak sadar dan juga kesadaran diskursif. Ketiganya dijelaskan oleh Giddens sebagai dimensi internal agen (Giddens, 2010, hlm. 10).

Mampu mengembangkan kemampuan baik dari segi ketrampilan dari mendapatkan akses pendidikan yang sama di sekolah. Peneliti melihatnya sebagai suatu kesadaran diskursif, dimana si agen mampu memberikan penjelasan yang terbuka tentang apa yang dilakukannya (Priyono, 2002, hlm. 28). Siswa Difabel memiliki alasan mengapa harus bersekolah untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama. Keikutsertaannya dalam menjalankan pendidikan inklusi disekolah itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta tanpa dipaksa oleh siapapun. Di balik kesadaran diskursif tersebut, secara tidak sadar agen juga memiliki kesadaran praktis.

KESIMPULAN

Pertama, implementasi pendidikan inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo sudah berjalan maksimal. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini telah melakukan berbagai upaya diantaranya, dikeluarkannya kebijakan sekolah mengenai pendidikan inklusi, Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler dengan sekolah menurunkan aspek pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) khusus anak difabel sesuai dengan kebutuhannya, Peserta didik anak difabel melakukan pembelajaran dikelas reguler dan membaur dengan anak-anak reguler, Penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk mendampingi peserta didik inklusi dalam pembelajaran dikelas reguler, serta Penyediaan ruang sumber sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak difabel di SMA Negeri 1 Gedangan. Seluruh upaya-upaya tersebut menjadi suatu budaya yang disebut *Inclusive Culture* (Budaya Inklusi).

Budaya inklusi ini kemudian menjadi suatu praktik sosial yang dilangsungkan secara berulang dan terus-menerus yang diulas melalui dimensi-dimensi struktural, yaitu legitimasi, dominasi, dan signifikasi (L-D-S). Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kebijakan yang ada telah cukup jelas membahas tentang pendidikan inklusi pada lingkungan heterogen. Selain adanya dimensi-dimensi struktural yang mempengaruhi berlangsungnya praktik sosial tersebut, di sisi lain ada pengaruh kuat yang juga menentukan keberlangsungan praktik sosial itu, yaitu birokrasi. Birokrasi dalam penelitian ini terlihat memiliki pengaruh yang besar tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi disekolah yang menjadi pioneer. Birokrasi ini pula yang pada akhirnya menentukan keberhasilan proses pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah.

Kedua, berbagai kegiatan sebagai proses pendidikan inklusi yang berjalan disekolah membentuk respon yang sama pada setiap siswa difabel. Respon ini terbentukkan dalam kesadaran pada diri agen. Dalam penjelasan Giddens, kesadaran praktis merupakan faktor yang penting dalam teori strukturalis. Meskipun kesadaran praktis tidak sepenuhnya terjadi pada seluruh siswa difabel. Kesadaran praktis hanya dimiliki oleh setiap siswa difabel yang menjalankan segala kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kesadaran praktis muncul dari rutinitas tertentu yang pada akhirnya membentuk perilaku agen yang beraktivitas begitu saja. Sementara itu, sebagian lainnya memunculkan kesadaran diskursifnya terhadap kegiatan dalam proses pendidikan inklusi tersebut karena siswa difabel tersebut tidak secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama disekolah. Sehingga pasca proses pembelajaran pendidikan inklusi disekolah telah berjalan, mereka tidak lagi melakukan rutinitas tersebut diluar sekolah sebab ketidak sesuaian dengan kemampuan yang dimiliki. Perbedaan rutinitas dari para siswa difabel ini mengindikasikan bahwa respon siswa difabel terhadap proses pembelajaran pendidikan inklusi perlu adanya optimalisasi lebih khusus perihal pengelompokan kemampuan masing-masing yang dimiliki siswa difabel.

REFERENSI

- Farassulthana dkk. (2015). *Implementasi Pola Interaksi Harmonis Melalui GPCIC sebagai Aternatif Pemecah Permasalahan Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan*. (Karya Tulis Ilmiah tidak dipublikasi). Sidoarjo
- Giddens, A. (2010). *Teori strukturalis: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial di masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mayrizka, Dwinda. (2014). *Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas (Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sidoarjo)*. (Skripsi dipublikasikan), Universitas Brawijaya, Malang.
- Nazir. (1998). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyono, B. H. (2002). *Anthony giddens suatu pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wirawan. (2012). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigm (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA